

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN
Volume 5, Nomor 2, Desember 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pengantar Redaksi.....	iii
Lembar Abstrak	iv-xviii
Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Importasi Ternak dan/atau Produk Hewan Berdasarkan Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan <i>Kuntari</i>	131-147
Urgensi untuk Melakukan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang <i>Achmadudin Rajab</i>	148-165
Arah Pengaturan Kebudayaan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan <i>Bagus Prasetyo</i>	166-185
Deskripsi Analisis Status Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 <i>Arif Usman</i>	186-200
Pergeseran Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Pengelolaan Hutan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <i>Rina Sartika Pamela</i>	201-217
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi <i>Mardisontori</i>	218-230
Kewenangan Pengujian dan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015) <i>Khopiatuziadah</i>	231-246
Permasalahan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing <i>Nova Manda Sari</i>	247-259

Tinjauan Yuridis Jual Beli Obat Keras melalui Media Online <i>Atisa Praharini</i>	260-275
Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia <i>Riyani Shelawati</i>	276-293
Kajian Yuridis terhadap Ekonomi Kerakyatan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah <i>Noor Ridha Widiyani</i>	294-312
Analisis Yuridis terhadap Rencana Pembentukan Induk Usaha (<i> Holding Company</i>) dalam Pengelolaan Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia <i>Muhammad Yusuf</i>	313-329

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 5 Nomor 2, Desember 2017. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 12 (dua belas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 12 (dua belas) tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Importasi Ternak dan/atau Produk Hewan Berdasarkan Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kedua, Urgensi Untuk Melakukan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ketiga, hArah Pengaturan Kebudayaan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Keempat, Deskripsi Analisis Status Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Kelima, Pergeseran Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Pengelolaan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Keenam, Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. Ketujuh, Kewenangan Pengujian dan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015). Kedelapan, Permasalahan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing. Kesembilan, Tinjauan Yuridis Jual Beli Obat Keras Melalui Media *Online*. Kesepuluh, Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Kesebelas, Kajian Yuridis Terhadap Ekonomi Kerakyatan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kedua belas, Analisis Yuridis Terhadap Rencana Pembentukan Induk Usaha (*Holding Company*) Dalam Pengelolaan Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Desember 2017

Redaksi

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Kuntari

Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Importasi Ternak dan/atau Produk Hewan Berdasarkan Pasal 36e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 131-147

Ketentuan Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU tentang Nakeswan) memungkinkan importasi ternak dan/atau produk hewan baik yang berasal dari negara tertentu yang bebas penyakit hewan (*country based*) maupun dari setiap zona tertentu dari wilayah suatu negara yang bebas penyakit hewan (*zone based*). Pasal 59 ayat (2) UU tentang Nakeswan membatasi harus dengan *country based*. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengimpor dan tidak selaras dengan tujuan awal UU tentang Nakeswan yaitu untuk melindungi wilayah Indonesia dari masuk dan menyebarnya penyakit hewan. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana arah pengaturan importasi ternak dan/atau produk hewan dalam UU tentang Nakeswan dan bagaimana keberadaan Pasal 36E UU tentang Nakeswan sebagai dasar pengaturan impor ternak dan/atau produk hewan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 129/PUU-XIII/2015. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum terkait pelaksanaan importasi hewan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa UU tentang Nakeswan memungkinkan pelaksanaan *country based* dan *zone based*. Penerapan keduanya harus diikuti kewaspadaan otoritas veteriner dan karantina untuk memastikan terlaksananya peraturan nasional dan internasional secara utuh dan bertanggung jawab. Kunci efektivitas penerapan Pasal 36E UU tentang Nakeswan berada pada frasa “dalam hal tertentu” yang perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menerapkan keduanya di Indonesia.

Kata kunci: peternakan, ternak, produk hewan, importasi

Juridical Analysis of The Regulation of The Importation of Livestock and/or Animal Product Based on Article 36e Law Number 41 Year 2014 on The Amendment of Law Number 18 Year 2009 on Livestock And Animal Health

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 131-147

Article 36E of Law Number 41 Year 2014 enables the livestock and/or animal product importation whether come from certain country which is free from animal disease (country based) or from any particular zone of the territory of a country (zone based). Article 59 paragraph (2) restrict importation of fresh animal products shall by country based. This difference causes legal uncertainty for importers and does not aligned with the original purpose of the Law to protect Indonesia territory from the entry and spread of animal diseases. Based on this matter, there are problems on how the direction of regulating the importation of livestock and/or animal products and how the existence of Article 36E Law Number 41 Year 2014 as the basis for regulating the importation after the Constitutional Court Decision Number 129/PUU-XIII/2015. This writing uses normative juridical method by analyzing the legal material relating the implementation of livestock importation. This paper concludes that Law Number 41 Year 2014 allows to implement country based and zone based. The implementation should be followed by vigilance of veterinary authority and quarantine to ensure the fulfillment and responsibility of national and international regulations implementation. The key to implement of Article 36E of Law Number 41 Year 2014 lies in the phrase “in certain cases” which needs to be harmonized with the Constitutional Court Decision and as an absolute requirement that must be met in implementing of both basis.

Keywords: farms, livestock, animal products, importation

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Achmadudin Rajab

Badan Keahlian DPR RI

Urgensi untuk Melakukan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 148-165

Pada saat ini pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam 3 (tiga) Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ketiga undang-undang ini masih berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan secara serentak. Terdapatnya 2 (dua) kali perubahan UU tentang Penetapan Perppu Pilkada menunjukkan bahwa undang-undang ini masih jauh dari sempurna. Bahkan pasca perubahan terakhir UU tentang Penetapan Perppu Pilkada, masih ada sejumlah persoalan yang lahir dari dikabulkannya beberapa permohonan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui masing-masing putusan Mahkamah Konstitusi pasca perubahan terakhir UU tentang Penetapan Perppu Pilkada dan untuk mengetahui apakah UU tentang Penetapan Perppu Pilkada perlu dirubah kembali atau dilakukan penggantian. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diyakini bahwa cukuplah urgensi untuk melakukan perubahan ketiga atas UU tentang Penetapan Perppu Pilkada.

Kata kunci: Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perubahan undang-undang

**PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Urgency to do the Third Amendment of The Law Number 1 Year 2015 On The Provision of Government Regulation A Substitute for The Law Number 1 Year 2014 On The Election of he Governor, Regent, and Mayor Into A Law

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 148-165

At the moment local election arranged in three law that is The Law Number 1 Year 2015 On The Provision Of Government Regulation A Substitute For The Law Number 1 Year 2014 On The Election Of The Governor, Regent, And Mayor Into A Law, The Law Number 8 Year 2015 On The Amandment of The Law Number 1 Year 2015 On The Provision Of Government Regulation A Substitute For The Law Number 1 Year 2014 On The Election Of The Governor, Regent, And Mayor Into A Law, and The Law Number 10 Year 2016 On The Second Amandment of The Law Number 1 Year 2015 On The Provision Of Government Regulation A Substitute For The Law Number 1 Year 2014 On The Election Of The Governor, Regent, And Mayor Into A Law. All of three law are still prevails as the legal basis for the election held at the same time. Because of two amandment of the law is a sign that the law of local election is still far from perfect. Even after the last change law of the local election, remains there are a few problems born from the verdict that came from some the judicial review by the constitutional court. The aims of this writing is to understand each of MK verdict since the amandment of the law about the local election and to understand whether of this law need to replace or need to be amandment. Writing of this writing using the juridical normative style of writing. And then with a constitutional court verdict is believed to be urgency that is enough to make changes third amandment of the law of local election.

Keywords: Local election, the constitutional court verdict, changes of law.

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Bagus Prasetyo

Badan Keahlian DPR RI

Arah Pengaturan

Kebudayaan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 166-185

Kekayaan bangsa Indonesia yang melimpah diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan). Permasalahan dalam tulisan ini, bagaimana arah pengaturan kebudayaan di Indonesia dan hal apa yang perlu disiapkan dalam menjalankan UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui arah pengaturan kebudayaan di Indonesia dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan UU tentang Pemajuan Kebudayaan agar dapat menjadi efektif. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif. Arah pemajuan kebudayaan berdasarkan UU tentang Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan semangat bahwa kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan langkah strategis dalam melakukan pemajuan kebudayaan yang dilakukan yaitu melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Agar UU tentang Pemajuan Kebudayaan dapat berjalan efektif maka perlu dipersiapkan *Pertama*, menetapkan peraturan pelaksanaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan. *Kedua*, mempersiapkan sumber daya manusia sebagai operator pusat data objek pemajuan kebudayaan termasuk menyiapkan standar kompetensi bagi operator pusat data mulai dari pendidikan dan pelatihan hingga sertifikasi. *Ketiga*, mempersiapkan sarana prasarana seperti komputer, baik berupa perangkat keras maupun *perangkat lunak*, serta taman budaya di daerah. *Keempat*, berupaya merubah paradigma di masyarakat menjadi bahwa pemajuan kebudayaan harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, dan bukan sebagai beban biaya. *Kelima*, melakukan berbagai upaya agar masyarakat kembali mencintai budayanya.

Kata kunci: hukum, pemajuan kebudayaan, warisan budaya nasional

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

***The Arrangement Direction
of Indonesian Culture Under The Law Number 5 of 2017 on The Advancement of Culture***

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 166-185

The wealth of Indonesia is abundant is expected to encourage the achievement of national goals to improve public welfare, to educate the life of the people and to participate toward the establishment of a world order based on freedom, perpetual peace and social justice. Currently, Law No. 5 of 2017 on Cultural Advancement has been enacted (Law on Cultural Advancement). The problems that are going to be solved by this writing, What is the direction of cultural arrangements in Indonesia in the Law on Cultural Advancement and what things need to be prepared in running the Law on Cultural Advancement in order to be effective. This paper aims to determine the direction of cultural arrangements in Indonesia in the Law on Cultural Advancement and what things need to be prepared in running the Law on Cultural Advancement in order to be effective. Writing method used is a qualitative method, namely the writing procedure that produces descriptive-analytical data. The direction of cultural promotion based on the Law on Cultural Advancement which is based on the spirit that culture as an investment to build the future and civilization of the nation. Based on the above, a strategic step in the promotion of culture is done through the protection, development, utilization, and cultural development. In order for the Law on Cultural Advancement can be effective then it needs to be prepared First, establish the implementation rules as mandated in the Law on Cultural Advancement. Second, preparing human resources as data center operators of cultural advancement objects including preparing competency standards for data center operators from education and training to certification. Third, preparing infrastructure such as computers, both in the form of hardware and software, as well as cultural parks in the region. Fourth, trying to change the paradigm in society is that the promotion of culture should be seen as an investment to build the future and civilization of the nation, and not as a cost burden. Fifth, to do various efforts to make people love their culture.

Keywords: law, cultural advancement, national cultural heritage

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Arif Usman

Badan Keahlian DPR RI

Deskripsi Analisis Status Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 186-200

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah beberapa kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK), salah satu putusan MK adalah putusan nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang intinya adalah hutan adat tidak lagi berstatus sebagai hutan negara, melainkan berstatus sebagai hutan hak. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah status hutan adat pasca putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan implikasi pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Adapun tujuan adalah memahami dan mengetahui status hutan adat dan implikasi pengelolaan hutan adat. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif. Konsekuensi yuridis dari keputusan ini, maka terdapat tiga nomenklatur status hutan di Indonesia yaitu hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Implikasi pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat ada dua, implikasi positif yaitu menguatkan pengakuan dan perlindungan Negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya dan implikasi negatif yaitu dapat memicu terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha dan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hutan adat sehingga kelestarian hutan adat terancam.

Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi, status hutan, masyarakat hukum adat.

Analysis Description of Customary Forest Status Post Decision of The Constitutional Court Number 35/PUU-X/ 2012

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 186-200

Law Number 41 Year 1999 has been filed by judicial review several times to the Constitutional Court (MK), one of the decision of the Constitutional Court is the decision number 35 / PUU-X / 2012 which decided to grant the petition for partly, which in essence is customary forest is no longer status as state forest, but status as forest of rights. The problem to be studied in this paper is how the status of customary forests after the decision of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012 and the implications of customary forest management by indigenous peoples. The objectives are to understand and know the status of customary forests and the implications of customary forest management. This paper is prepared with a normative juridical approach that is by conducting an assessment of literature sources. After the data collected then the data is analyzed by descriptive analysis. The juridical consequence of this decision, then there are three nomenclature of forest status in Indonesia that is state forest, forest rights and customary forest. The implications of customary forest management by indigenous peoples have two positive implications: to strengthen the recognition and protection of the State over the rights of customary law communities over their customary forests and the negative implications of triggering conflicts between customary law communities and business actors and causing the destruction of customary forests custom is threatened.

Keywords: constitutional court decision, forest status, customary law community.

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Rina Sartika Pamela

Badan Keahlian DPR

Pergeseran Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Pengelolaan Hutan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 201-217

Perubahan peta politik pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebabkan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Tahun 2014). Khusus untuk sektor kehutanan, UU Pemda Tahun 2014 memberikan pergeseran/perubahan urusan pemerintahan dengan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan mengenai bagaimana pergeseran urusan dan kewenangan antar tingkat pemerintahan berdasarkan UU Pemda Tahun 2014 serta bagaimana implikasi hukumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pergeseran urusan dan kewenangan antar-tingkat pemerintahan tersebut. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pergeseran pembagian urusan bidang kehutanan meliputi sub urusan perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta pengawasan kehutanan. Implikasi hukum dari pergeseran ini antara lain pemerintah pusat tetap melibatkan pemerintah provinsi dalam proses pengukuhan kawasan hutan, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan mengajukan area penggunaan lain dikarenakan kewenangan tersebut ditarik dan dikonsolidasikan seluruhnya di tingkat provinsi, institusi kesatuan pengelolaan hutan di tingkat kabupaten akan berada di bawah otoritas provinsi, dan tahapan pemberian izin lokasi dalam kawasan hutan dimulai dari pemeriksaan usulan oleh balai pemantapan kawasan hutan dan meminta pertimbangan teknis provinsi melalui dinas kehutanan provinsi serta diajukan kepada menteri untuk mengeluarkan keputusan (izin lokasi) perubahan kawasan.

Kata kunci: pemerintahan daerah, pergeseran/perubahan kewenangan, pengelolaan hutan

**PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Shift of Division of Government Affairs Regarding Forest Management Under The Law NO. 23 Year 2014 on Regional Government

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 201-217

The changes of government political map of Republic of Indonesia led to the establishment of Law No. 23 of 2014 on Regional Government (Regional Government Act 2014). Especially for the forestry sector, this law provides a shift/change in governmental affairs which be divided between the central government and provincial government except those related to the management of regency/municipal forest park shall be the authority of the regency/municipal government. Based on this, there are problems regarding the shift in affairs and authorities between levels of government based on the 2014 Government Act and the legal implications of it. The purpose of this paper is to know the shift of affairs and authorities between levels of government based on the law. This writing used the normative law method with the spesification of descriptive analytical. Shifting of forestry affairs distribution includes sub-forest planning affairs, forest management, education and training, counseling and community empowerment in the field of forestry, and forestry control. The legal implications of this shift comprise the central government involve the provincial government in the process of establishing forest areas, the district government no longer has the authority to propose other areas of use as they are withdrawn and consolidated entirely at the provincial level, the forest management unit at the district level under the authority of the province, and the stage of granting the location permit in the forest area started from the inspection of the proposal by the forest area conservation center and requesting technical consideration of the province through the provincial forestry service and submitted to the minister to issue a decision of area change.

Keywords: local government, shifting/ changing of authority, forest management

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Mardisontori

Badan Keahlian DPR

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 218-230

Selama tahun 2017, Presiden Joko Widodo sudah dua kali menggunakan hak konstitusionalnya dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu Perpajakan) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Kedua Perppu tersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu. Perppu Ormas khususnya, sudah banyak dilakukan *judicial review* oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Perppu dapat diuji oleh MK. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan bahwa MK berwenang menguji undang-undang, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan dinyatakan setingkat dengan undang-undang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Perppu dapat diuji oleh MK dan bagaimana landasan hukumnya. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perppu serta putusan MK. Meskipun secara eksplisit tidak ditemukan kewenangan MK dalam pegujian Perppu, akan tetapi berdasarkan alasan bahwa Perppu setingkat dengan UU dan muatan materi Perppu juga sama dengan muatan UU, maka MK berwenang untuk menguji Perppu walaupun Perppu belum mendapat persetujuan atau penolakan oleh DPR. Hal ini supaya hak konstitusi masyarakat tetap dijamin.

Kata kunci: Perppu, pengujian, Mahkamah Konstitusi

Judicial Review of Government Regulation in Lieu of Law by the contitutional court

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 218-230

In 2017, President Joko Widodo has twice used his constitutional right in issuing the government regulation in lieu of law (Perppu), namely Perppu No. 1 of 2017 on Financial Information Access for Tax Interest (Perppu Taxation) and Perppu No. 2 Year 2017 On Amendment of Law Number 17 Year 2013 on Community Organization (Perppu Ormas). The two Perppu are issued based on Article 22 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) stating that in the event of a pressing incident/emergency, the President shall be entitled to enact the Perppu. Perppu Ormas, especially, has been a lot of judicial reviews by the public to the Constitutional Court (MK). However, there is no obscurity in the Laws and Regulations stating that the Perppu can be review by the Constitutional Court. Article 24C of the 1945 Constitution only states that the Constitutional Court has the authority to examine the Law, although in Law Number 12 Year 2011, the Perppu in the hierarchy of regulations is the same level as the Act. This paper aims to determine whether the Perppu can be tested by the Constitutional Court and how it's legal basis. The method of writing used is the normative juridical method by analyzing the regulations related Perppu as well as the Decision of the Constitutional Court. Although it is not explicitly found the authority of the Constitutional Court in review Perppu, however, based on the reason that the Perppu is the same level as Law and content of the Perppu is also equal to the Law, the Constitutional Court is authorized to test the Perppu even though the Perppu has not been approved or rejected by the DPR yet. This is so that the constitutional rights of the community remain guaranteed.

Keywords: Government Regulation In lieu of Law, judicial review, Constitutional Court

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Khopiatuziadah

Badan Keahlian DPR

**Kewenangan Pengujian dan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
(Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015)**

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 231-246

Pengujian dan pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan produk bersama antara kepala daerah kabupaten/kota dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota menghadapi dualisme pengaturan. Satu sisi pengujiannya dapat dilakukan melalui *judicial review* di Mahkamah Agung. Di sisi lain, dalam praktiknya selama ini dilakukan juga pembatalan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melalui suatu *executive review*. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 kemudian membatalkan proses *executive review* yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan ini mengkaji secara yuridis normatif bagaimana dualisme pembatalan dan pengujian peraturan daerah kabupaten/kota dan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Putusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri dualisme tersebut namun peran pemerintah dalam mengevaluasi rancangan perda kabupaten/kota tetap berjalan. Putusan Mahkamah Konstitusi hakikatnya menginginkan perbaikan mekanisme penertiban perda agar lebih hati-hati. Proses evaluasi rancangan perda menjadi hal yang sangat signifikan dalam pembentukan perda, sehingga peran pemerintah pusat dituntut lebih kuat dan memadai dalam mengawal lahirnya berbagai perda.

Kata kunci: peraturan daerah kabupaten/kota, pengujian dan pembatalan peraturan daerah, *judicial review*, *executive review*.

Authority to Review Municipal/City Regulation

(Study on Constitutional Court Decision on Case Number 137/PUU-XIII/2015)

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 231-246

The review process of municipal/city regulations as one type of legislations that is a result of joint deliberation between the head of municipal head and the regional legislature faces a dualism regulation. One side of the review can be done through judicial review in the Supreme Court. However, in practice so far it is possible to be cancelled by the Governor as the representative of the central government in the region through an executive review. The Constitutional Court Decision Number 137 / PUU-XIII / 2015 then states that the executive review process which has been regulated in Law Number 23 Year 2014 on Regional Government is null. This paper examines the normative juridical on how the dualism of the review process of municipal regulations and the implications of the Constitutional Court Decision concerned. The Constitutional Court's decision ends such dualism but in practice the role of the government in evaluating municipal regulation is still running. The Constitutional Court's decision essentially wants to improve the mechanism of controlling the local regulation to be more careful. Evaluation toward draft of municipal regulation being a significant step in local regulation formation so that the role of government is demanded to be more powerfull and sufficient ini guarding the formation of local laws.

Keywords: Municipal regulation, review process of municipal regulation, judicial review, executive review

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Nova Manda Sari

Badan Keahlian DPR RI

Permasalahan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 247-259

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak WNI oleh WNA merupakan salah satu jenis dari pengangkatan anak yang ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No.54 Tahun 2007). Lemahnya pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak WNI oleh WNA menimbulkan permasalahan yuridis. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yuridis dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA dan solusi untuk mengatasi permasalahan yuridis pengangkatan anak WNI oleh WNA. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Akibat lemahnya pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan sehingga berdampak pada, *Pertama*, penyimpangan motif pengangkatan anak dari prinsip dasar pengangkatan anak seperti perdagangan anak yang berkedok pengangkatan anak internasional; dan *Kedua*, lemahnya bimbingan dan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain perlu sosialisasi ketahanan keluarga pranikah dan pascanikah agar mengetahui dan meningkatkan kewaspadaan sindikat perdagangan anak yang berkedok pengangkatan anak internasional, dan perlu mengubah peraturan pelaksana pengangkatan anak.

Kata kunci: pengangkatan anak, warga negara Indonesia, warga negara asing

Juridical Problems of Intercountry Adoption

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 247-259

The adoption of a child is a legal act of transfer a child from a parental authority, legal guardian, or other person responsible for the care, education and upbringing of the child into the host family environment. Intercountry adoption is one of the types of adoption of children in Indonesia based on Government Regulation No. 54 Year of 2007 on the Implementation of the adoption a Child (Government Regulation No. 54 Year of 2007). The weak regulation and implementation of legislation related to intercountry adoption creates juridical problems. The purpose of this writing is to know the juridical issues in the intercountry adoption and solutions to overcome the juridical issues of intercountry adoption. Writing method used is method of juridical normative with approach of regulation of law. The juridical issues of intercountry adoption include the motive of adoption which deviates from the basic principles of adoption such as child trafficking under the guise of intercountry adoption. Due to the weakness of regulation and the implementation of legislation so as to impact on: First, the deviation of motives for adoption of child basic principles of adoption such as trafficking of children under the guise of intercountry adoption; and Second, weak government guidance and supervision on the implementation of the appointment of Indonesian Citizens by foreign citizen. The solution to overcome these problems, among others, is to socialize the resilience of pre-marital and post-marriage families in order to know and increase the awareness of child trafficking syndicates that impersonate intercountry adoption, and need to change the implementing regulations on adoption of a child.

Keywords: adoption of a child, Indonesian citizen, foreign citizen

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Atisa Praharni

Badan Keahlian DPR

Tinjauan Yuridis Jual Beli Obat Keras melalui Media Online

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 260-275

Perkembangan teknologi informasi membuat banyak hal menjadi instan, mudah, dan praktis, termasuk dalam membeli obat. Obat keras yang seharusnya dibeli di apotek dan harus dengan resep dokter, saat ini dapat dibeli melalui media *online*, padahal obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan apabila dikonsumsi secara sembarangan dapat berbahaya seperti meracuni tubuh, memperparah penyakit, bahkan menyebabkan kematian. Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan ,mengenai jual beli obat keras melalui media *online* ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan implikasi hukum yang berpotensi terjadi dari jual beli obat keras melalui media *online*. Tujuan penulisan ini mengetahui jual beli obat keras melalui media *online* ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan implikasi hukum yang berpotensi terjadi dari jual beli obat keras melalui media *online*. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur terkait. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur secara tegas mengenai jual beli obat keras melalui media *online*. Implikasi dari penjualan obat keras melalui media *online* sangat berpotensi membahayakan pembeli/konsumen seperti terjadinya pemalsuan resep, informasi mengenai obat kurang jelas, proses pengiriman yang dapat mengganggu stabilitas obat, dan kesalahan pengiriman obat.

Kata kunci: obat, apoteker, *online*

Judicial Review of The Sale of Prescription-Only Medicines Through Online Media

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 260-275

The development of information technology makes things instant, easy, and practical, including in buying drugs. Prescription-only medicines that should be purchased at pharmacies and must be prescribed by doctor, can now be purchased through online media. Prescription-only medicines are dangerous drug and if consumed arbitrarily can be dangerous such as poisoning the body, aggravate the disease, even cause death. This paper aims to the validity of the sale of prescription-only medicines through the online media in terms of legislation and legal implications that potentially occur from the sale of prescription-only medicines through online media. The method of writing used is the normative juridical method through literature study of legislation and some related literatures. Until now there is no legislation in the health sector that strictly regulated the sale of prescription-only medicines through online media. The implications of prescription-only medicines sales through online media are potentially harmful to buyers/consumers for example false prescription, lack of drug information, shipping processes that could interfere with drug stability, and drug delivery errors.

Keywords: *medicines, pharmacist, online*

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Riyani Shelawati

Badan Keahlian DPR RI

Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 276-292

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU tentang Paten), para inventor sebagai pemegang Paten dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan menjaminkan paten dari hasil invensinya. Adanya ketentuan dalam UU tentang Paten yang menjadikan paten sebagai objek jaminan fidusia tidak serta merta membuat pihak perbankan dengan mudah memberikan pinjamannya. Sampai saat ini, pengajuan kredit dengan menggunakan objek jaminan kredit berupa paten belum pernah dilakukan di Indonesia. Tulisan ini mengangkat permasalahan apa yang menjadi landasan sehingga paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan bagaimana mekanisme penjaminan paten sebagai objek jaminan fidusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi landasan sehingga paten dapat dijadikan jaminan objek fidusia dan mekanisme penjaminan paten sebagai objek jaminan fidusia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan paten telah memenuhi syarat objek jaminan, yakni paten termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud dan memiliki hak kepemilikan, dapat beralih dan dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan memiliki nilai ekonomis. Paten yang dijadikan objek jaminan fidusia harus didaftarkan dalam daftar umum paten dan kantor pendaftaran fidusia. Layak atau tidaknya suatu paten dijadikan jaminan objek fidusia ditentukan berdasarkan penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi yang harus dilakukan oleh pemberi pinjaman sebelum memberikan pinjaman.

Kata kunci: paten, kekayaan intelektual, jaminan, fidusia

Patent as A Fiduciary Collateral

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 276-292

With the issuance of Law No. 13 of 2016 on Patents (Law on Patents), particularly those governing patents as fiduciary security objects, the inventors as holders of Patents may obtain loans from banks by pledging patents on the invention. The existence of the provisions in the Law on Patents that make patents as fiduciary security objects does not necessarily make the banks easily provide loans. Until now, credit application using credit guarantee object in the form of patent has not been done in Indonesia. This paper raises the issue of what is the foundation so that patents can be used as object of fiduciary guarantee and how mechanism of patent guarantee as object of fiduciary guarantee. This paper aims to know the foundation thus patents can be used as collateral fiduciary objects and mechanism of patent guarantee as object of fiduciary guarantee. This writing method uses normative juridical method with secondary data which analyzed qualitatively. This paper concludes that because patent has fulfilled the terms of the guarantee object; patents can be used as fiduciary objects. The reason why patent can be used as fiduciary security object, because the patent belongs to the category of intangible moving object and has the right of ownership, can be switched and diverted, either partly or wholly, and has economic value. The patent used as the fiduciary guarantee object shall be registered in the general register of patents and the fiduciary registration office. Whether or not a patent is a guarantee of a fiduciary object is determined on the basis of legal and economic judgment by the lender prior to lending.

Keywords: patent, intellectual property, collateral, fiduciary

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Noor Ridha Widiyani

Badan Keahlian DPR RI

Kajian Yuridis terhadap Ekonomi Kerakyatan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 293-311

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemerintah daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, oleh karena itu ekonomi rakyat yang menjangkau usaha mikro seharusnya dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pendapatan asli daerah serta pendayagunaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi. Potensi penerimaan pajak dari pelaku usaha ekonomi kerakyatan khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberikan perhatian oleh pemerintah daerah, termasuk juga mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, meningkatnya ekonomi kerakyatan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatnya pendapatan asli daerah akan memberikan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: keuangan daerah, ekonomi kerakyatan, pendapatan asli daerah

Juridical Analysis of People Economy to Increase Local Revenue

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 293-311

The Article 18 paragraph 2 of the Constitution of Indonesia 1945 stated that the regional authorities of provinces, regencies, and municipalities shall administer and manage their own affairs according to the principles of regional autonomy and the duty of assistance. In carrying out the governmental affairs under its authority, the local government must have a source of income to provide services and welfare to the community in its region. Therefore, a strategy in managing local revenue, particularly to increase local revenue, is essential for the local government. Every region in Indonesia has a distinctive characteristic; therefore a "people economy" which covers micro businesses should be used as a solution to increase economic revenue of a region. This article uses a juridical normative method and qualitative approach in analyzing secondary data. The article finds that local governments can maximize their local revenue by optimizing the income from tax and retribution. Therefore, the potential to obtain taxes from people economy business doers - especially micro, small, medium enterprise - needs to be the focus of local government, including issuing policies to elevate the people economy. Consequently, the growth of people economy will increase local revenue and the increased local revenue will further benefit the people in the form of community welfare.

Keywords: regional finance, people economy, local revenue

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Muhammad Yusuf

Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis terhadap Rencana Pembentukan Induk Usaha (*Holding Company*) dalam Pengelolaan Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 2, Desember 2017, halaman 312-328

Minyak mentah dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Posisi strategis minyak dan gas bumi tidak lain dalam hal kebutuhan pasokan energi yang dipergunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Semakin menurunnya jumlah *lifting* minyak dan gas bumi serta pengelolaan kelembagaan yang tidak tepat merupakan permasalahan utama yang menyebabkan kekurangan pasokan energi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi ke depan dan implikasi hukum dari pembentukan induk usaha (*holding company*) minyak dan gas bumi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data skunder yang dianalisis secara deskriptif analitis. Melihat besarnya sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dan kebutuhan akan minyak dan gas bumi, maka diperlukan pengelolaan secara tepat melalui pembentukan suatu kelembagaan yang secara fungsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembentukan kebijakan, pengendalian, regulasi maupun pengawasan. Pengaturan mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi kedepannya dilaksanakan melalui pembentukan induk usaha (*holding company*) yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi pengelolaan minyak dan gas bumi (*migas*) saat ini sekaligus meningkatkan perolehan *lifting* minyak dan gas bumi melalui peningkatan cadangan terbukti, penemuan wilayah kerja baru, dan kebijakan ekspor maupun impor.

Kata kunci: minyak bumi, gas bumi, induk usaha

Legal Analysis on Planning of Establishment of Holding Company to Manage Indonesian Oil and Gas Industry

Prodigy Journal Vol. 5 No. 2, December 2017, page 312-328

*Crude oil and natural gas are one of the most important and strategic natural resources for human life. The strategic position of oil and gas is nothing else in terms of the energy supply needs used in the various activities of human life. The declining number of oil and gas lifting and improper institutional management is a major problem causing shortage of energy supply. This paper is intended to know the general description of the management of petroleum and natural gas in Indonesia. The writing method used is analytical descriptive method. Considering the amount of natural resources contained in Indonesia and the need for oil and natural gas, it is necessary to take action to establish a one body (*holding company*) that able to take the advantage to make a policy, control, regulation and supervision. The regulation of oil and gas management in the future will be implemented through the establishment of a holding company which is expected to improve the condition of oil and gas management through increasing proven reserves, new work area discovery, and export and import policies.*

Keywords: crude oil, natural gas, holding company